

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Konsep Pengembangan Pariwisata

Terdapat 3 aspek penting yang menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan pariwisata yang disingkat dengan 3A (Atraksi, Akseibilitas, Amenitas). Aspek 3A merupakan syarat minimal bagi pengembangan sebuah destinasi wisata. Setiap destinasi wisata tentunya mempunyai keistimewaan dan ciri khas tersendiri yang membuat banyak orang ingin mengunjungi destinasi wisata tersebut. Disisi lain, faktor amenitas dan akseibilitas akan menjadi kunci bagi wisatawan untuk tetap menikmati pengalaman berwisata. Ketiga faktor itu berperan penting dalam menciptakan pengalaman perjalanan yang nyaman dan menyenangkan bagi wisatawan menurut Sugiama(2014)

1. “Atraksi merupakan komponen yang signifikan dalam menarik wisatawan. Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan itu ada tiga : *Natural Resources* (Alami), atraksi wiata budaya dan atraksi buatan manusia itu sendiri. Modal kepariwisataan itu dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata ditempat dimana modal tersebut ditemukan. Keberadaan atraksi menjadi alasan serta motivasi wiaatawan untuk mengunjungi suatu daya tarik wisata(DTW).
2. Akseibilitas adalah sarana dan infrakstruktur untuk menuju destinasi. Akses jalan raya, ketersediaan sarana transpormasi dan rambu-rambu penunjuk jalan merupakan aspek penting bagi sebuah destinasi. Banyak sekali wilayah di Indonesia mempunyai keindahan alam dan budaya yang layak untuk dijual kepada wisatawan, tetapi tidak, mempunyai akseibilitas yang baik. Sehingga ketika diperkenalkan dan dijual, tak banyak wisatawan yang tertarik untuk mengunjunginya.

3. Amenitas adalah segala fasilitas pendukung yang bias memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada didestinas. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum. Kebutuhan lain yang mungkin juga diinginkan dan diperlukan oleh wisatawan, seperti toilet umum, rest area, tempat paker, klinik kesehatan, dan sarana ibadah sebaikan juga tersedia disebuah destinasi”.

2.1.2 Pengembangan Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu potensi sumber daya yang dapat di kembangkan oleh setiap daerah sebagai salah satu sumber daya yang menghasilkan devisa bagi negara. Pariwisata merupakan fenomena sosial yang sangat kompleks dan bersifat multisektoral. Pandangan demikian itu menimbulkan berbagai persepsi dan pemahaman terhadap pariwisata, baik sebagai sebuah konsep, sebagai aktifitas, sebagai industry, maupun sebagai system. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang memiliki keunikan, keindahan alam, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya serta hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah (Winarto et al., 2015) (Rahmi. 2016). Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha (Nugroho, 2018).

Perkembangan pariwisata yang sangat pesat dan terkonsentrasi dapat menimbulkan berbagai dampak (Soewarni et al., 2019). Masyarakat daerah setempat secara tidak langsung merasakan adanya dampak dari pariwisata yang ada Menurut Kurniawan et al (2015). Pengembangan destinasi dan daya tarik

wisata adalah poin penting dalam sektor pariwisata yang perlu melibatkan stakeholder untuk bekerjasama dari kalangan usaha atau swasta Menurut Devy & Soemanto (2017). Pemerintah menjadi fasilitator yang memiliki peran serta wewenang dalam membuat dan menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan destinasi serta daya tarik wisata. Daya tarik wisata sendiri menjadi bagian utama pada pelaksanaan pariwisata, karena pengaruh utama yang menyebabkan pelaku wisata tertarik untuk mendatangi destinasi pariwisata yaitu potensi wisata serta daya tarik yang terdapat pada destinasi pariwisata tersebut. Dengan adanya pengembangan pariwisata yang baik maka akan banyak membawa manfaat serta keuntungan bagi masyarakat serta daerah.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pengembangan pariwisata, menurut O.A Yoeti (2016) yaitu seperti :

1. “Wisatawan (*Tourism*)

Mengetahui ciri dan karakteristik yang dimiliki wisatawan seperti asal, usia, status sosial, pekerjaan, pada waktu dimana mereka melalui perjalanan untuk berwisata. Pada kunjungan pariwisata dapat dipengaruhi oleh beberapa konsep diantaranya yaitu konsep wisata, interpersonal, fisik, budaya dan prestise.

2. Transportasi

Transportasi adalah faktor yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam melakukan pergerakan dari tempat ke tempat lain.

3. Fasilitas pelayanan

Fasilitas pelayanan yaitu sarana pendukung objek wisata seperti ketersediaan akomodasi seperti hotel dengan aksesibilitas yang mudah, rumah makan, jaminan keselamatan, prasarana perhubungan, penerangan, fasilitas telkomunikasi, dan perbankan.

4. Atraksi (Objek Wisata)

Atraksi objek wisata menjadi bagian dari unsur yang dapat menarik wisatawan, contohnya seperti sarana olahraga, tempat hiburan, museum sejarah dan lainnya”.

Pengertian Pariwisata untuk mengantisipasi perkembangan dunia pariwisata yang sudah bersifat global, maka pemerintah Indonesia mengundang undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang terdiri dari 17 bab dan 70 pasal, termasuk ketentuan delapan hal, yaitu :

1. “Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
5. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi penuhi kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata”.

Pengembangan sektor pariwisata hakekatnya merupakan interaksi antara proses sosial, ekonomi, dan industry. Oleh karena itu unsur-unsur yang terlibat di dalam proses tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Peran serta masyarakat diharapkan mempunyai andil yang sangat besar dalam proses ini (Dinata, dkk 2020).

2.1.3 Dasar Hukum Pariwisata

Dasar hukum tentang pariwisata telah diatur dalam Undang-Undang No 9 Tahun 2021 Tentang Pendoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan menjelaskan ketentuan umum tentang pariwisata, asas-asas pariwisata, prinsip penyelenggaraan pariwisata, fungsi dan tujuan pariwisata, pembangunan kepariwisataan, kawasan strategis, usaha, larangan, kewenangan pemerintah kabupaten dan pemerintah daerah, kpprdinasi, hak dan kewajiban pariwisata, Badan Promosi Wisata Indonesia, gabungan industry pariwisata Indonesia, pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, tenaga kerja, pendanaan, sanksi administrative, ketentuan pidana, ketentuan peralihan serta ketentuan penutup.

1. Asas Pariwisata

Menurut undang-undang no 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata diselenggarakan atas asas-asas berikut ini:

1. Manfaat : Manfaat diartikan dengan pelaksanaan pembangunan pariwisata harus memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada seluruh masyarakat. Baik itu manfaat ekonomi seperti terciptanya peluang usaha dan membuka lapangan kerja maupun manfaat sosial dan budaya dengan adanya interaksi sosial akibat adanya kegiatan pariwisata sehingga diperoleh informasi dan pengetahuan.
2. Kekeluargaan : kekeluargaan diartikan dengan pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dilakukan bersama-sama serta semangat kebersamaan, serta menghindari terjadinya benturan sosial yang memudarkan nilai-nilai kekeluargaan dalam kehidupan sosial dan masyarakat.

3. Adil dan Merata : adil dan merata diartikan dengan seluruh masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Merata diartikan semua masyarakat berhak menikmati hasil dari kegiatan kepariwisataan sesuai nilai-nilai darmabakti.
4. Keseimbangan : keseimbangan diartikan dengan pelaksanaan pembangunan pariwisata dilakukan secara seimbang antar pembangunan ekonomi, pembangunan mental dan karakter sosial, serta interaksi sosial individu.
5. Kemandirian : Kemandirian diartikan dengan pelaksanaan kepariwisataan harus membangun kemandirian bangsa agar tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya.
6. Kelestarian : Kelestarian disrikan dengan pelaksanaan pembangunan pariwisata harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumber daya alam ataupun sumber daya sosial dan budaya. Eksploitasi sumber daya yang berkelebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerusakan lingkungan ataupun penurunan sumber daya yang tidak menguntungkan.
7. Partisipatif : Partisipatif berarti bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan pariwisata. Sehingga masyarakat berperan lebih banyak dari menikmati hasilnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab sosial atas pembangunan pariwisata akan meningkat dengan terlibatnya masyarakat.
8. Berkelanjutan : Berkelanjutan berarti bahwa pelaksanaan pariwisata harus mempertimbangkan prinsip-prinsip berkelanjutan agar kebutuhan generasi saat ini maupun kepentingan generasi

yang akan dating terpenuhi. Manfaat jangka panjang dan jaminan pengelolaan akan terpenuhi dengan diterapkannya prinsip ini.

9. Demokratis : Demokratis berarti mengedepankan keadilan dan musyawarah. Tujuannya agar terikat secara sosial dan politik, ekonomi serta menyelesaikan masalah dengan mufakat dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata.

10. Kesetaraan ; Kesatuan berarti adanya kesetaraan antar pelaku pelaksanaan pariwisata seperti pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan, mulai dari tahapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengontrolan, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan.

11. Kesatuan ; kesatuan berarti bahwa kegiatan pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

12. Professional : Profesional diartikan dengan mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pariwisata.

2. Fungsi Pariwisata

Menurut UU No 10 Tahun 2009, fungsi pariwisata adalah untuk memenuhi kebutuhan intelektual, serta kebutuhan rohani dan jasmani setiap wisatawan yang dapat dilakukan dengan cara berekreasi serta melakukan perjalanan. Hal ini juga dapat meningkatkan pendapatan negara mewujudkan kesejahteraan rakyat.

3. Tujuan Pariwisata

Pariwisata bertujuan untuk UU No 10 tahun 2009 ;

1. “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Menghapus kemiskinan
4. Mengatasi pengangguran

5. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
6. Melestarikan dan memajukan kebudayaan serta perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan
7. Mengangkat citra bangsa
8. Menumpuk rasa cinta tanah air
9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
10. Mempercepat persahabatan antar bangsa”.

2.1.4 Jenis Pariwisata

Pariwisata terdiri dari lima jenis, yaitu sebagai berikut :

1. “Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*) pariwisata ini dilakukan untuk para wisatawan dengan tujuan untuk berlibur atau mencari kesenangan yang baru, mengunjungi suatu tempat yang baru, mengunjungi suatu tempat yang baru, serta menikmati hiburan yang ada di kota-kota besar dan ikut serta dalam keramaian pariwisata.
2. Pariwisata untuk rekreasi (*recreation tourism*) adalah bentuk perjalanan yang dilakukan oleh individu saat mereka berlibur atau mengambil cuti dan kegiatan sehari-hari mereka. Tujuan utamanya adalah untuk menyegarkan tubuh dan pikiran, seringkali melibatkan kunjungan ke tempat-tempat yang telah direncanakan sebelum agar pengalaman liburam mereka lebih terorganisir.
3. Pariwisata untuk kebudayaan (*cultural tourism*), pariwisata ini dilakukan wisatawan untuk tujuan mengunjungi suatu daerah dengan keinginan mengetahui kebudayaan di suatu daerah tersebut, mengunjungi pusat kesenian, mengunjungi pusat keagamaan, mempelajari adat-istiadat serta mengunjungi tempat-tempat sejarah.
4. Pariwisata olah raga (*sport tourism*) pariwisata olahraga melibatkan wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berpartisipasi dalam kegiatan olahraga atau mengadiri acara olahraga, termasuk even-even nasional atau regional. Wisatawan ini melakukan perjalanan

dengan tujuan utama untuk berolahraga atau menyaksikan pertandingan olahraga yang menarik.

5. Pariwisata untuk keperluan bisnis (*business tourism*) pariwisata ini dilakukan oleh para wisatawan yang secara profesional melakukan perjalanan wisata semata-mata untuk keperluan bisnis”.(Rusyidi and Fedryansah 2018).

2.1.5 Dampak Pariwisata

Dampak dalam kosa kata Bahasa Indonesia berarti akibat. Dampak positif adalah dampak yang menguntungkan sedangkan dampak negatif adalah dampak yang merugikan. Dampak juga dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada lingkungan setempat akibat aktivitas manusia . Dampak ekonomi total dari pariwisata adalah jumlah total dampak langsung, tidak langsung, atau dampak yang ditimbulkan, masing-masing dinyatakan sebagai produk bruto atau penjualan , pendapatan, lapangan kerja (*employment*), dan nilai tambah (*value add*) dapat diukur. Faktanya, kegiatan pariwisata membawa manfaat bagi daerah dalam hal penjualan, keuntungan, lapangan kerja, penerimaan pajak dan pendapatan. Hampir semua literatur dan studi lapangan menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata dapat memberikan dampak positif bagi wilayah tersebut. Lebih lanjut, dampak sosial sebenarnya dari pariwisata dibagi menjadi dua kategori: dampak kualitatif dan dampak kuantitatif. Pertama, dampak kualitatif sangat sulit diukur. Karena efek ini hanya bisa diamati. Misalnya memiliki dua budaya yang ada dalam kehidupan sosialnya. Komersialisasi kebudayaan terjadi bila penyelenggara pertunjukan seni dipertunjukkan kepada wisatawan semata-mata untuk tujuan wisata dan tanpa ada nilai sakral yang melekat padanya. Kedua, dampak sosial pariwisata secara kuantitatif relatif mudah diukur, seperti peningkatan angka kejahatan, prostitusi, dan penyalahgunaan narkoba.

2.1.5.1 Dampak Pariwisata Terhadap Sosial

Interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal pada aktivitas pariwisata akan menimbulkan dampak sosial. Dampak yang dimaksud bisa menghasilkan hasil positif dan negatif. Dampak negatif dari adanya pariwisata pada masyarakat sekitar adalah bergesernya atau berubahnya pola hidup masyarakat mengikuti pola hidup pengunjung atau wisatawan yang khususnya remaja dan anak-anak seperti penggunaan bahasa, cara berpakaian dan lain-lain (Murniatmo dalam Yusuf & Hadi, 2020). Secara teoritis, mengelompokkan dampak sosial dari aktivitas pariwisata ke dalam sepuluh kelompok besar;

1. “Dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat yang lebih luas, termasuk otonomi dan ketergantungannya Interaksi masyarakat dengan wisatawan terutama dari sisi perubahan tata nilai hidup. Kedatangan wisatawan yang memiliki sikap berbeda-beda dapat menyebabkan percampuran tata nilai di daerah tujuan wisata tersebut. Pengembangan pariwisata berdampak pada perubahan tata nilai hidup, yang pertama sifat individualis melalui kegiatan yang ada di tengah masyarakat seperti kunjungan dengan tetangga, tolong menolong, dan juga kerja bakti, yang kedua gemar hura-hura, yang ketiga sifat sekularisme dan yang terakhir adalah konsumerisme (Urbanus & Febianti, 2017).
2. Dampak terhadap hubungan interpersonal antar-anggota masyarakat Dengan adanya kepariwisataan di suatu wilayah akan mewujudkan dan menghadirkan berbagai usaha, bahkan bisa di bidang yang sama, sehingga akan menimbulkan persaingan antar anggota masyarakat.
3. Dampak terhadap dasar-dasar organisasi/kelembagaan sosial Kemajuan pariwisata diikuti dengan munculnya organisasi atau kelembagaan sosial untuk mengorganisir industri yang ada, seperti beberapa sektor pemasaran, sektor pendukung rupa-rupa.
4. Dampak terhadap migrasi dari dan ke pariwisata Meningkatnya aktivitas pariwisata di daerah tujuan wisata memerlukan tenaga kerja

untuk memberikan pelayanan yang diperlukan wisatawan. Sehingga populasi dan kepadatan penduduk akan meningkat di sekitar objek wisata. Perlahan-lahan hal ini akan menimbulkan masalah sosial seperti meningkatnya stress, kemacetan, sampai ke tindakan kriminal. Dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat Pariwisata juga akan menyebabkan permasalahan bagaimana masyarakat bertindak dalam kehidupan sehari-hari sebagai tuan rumah, sebagai berikut:

- a. Terlalu sesaknya orang, akibat kedatangan wisatawan dalam jumlah besar suatu komunitas akan menjadi sesak akibat perbedaan gaya hidup dan kebudayaan yang berbeda jauh yang tiba-tiba hadir dan menghilang dalam waktu singkat.
 - b. Kemacetan lalu lintas
 - c. Penggunaan infrastruktur dan manfaat sosial tanah
 - d. Kehilangan manfaat dan usaha lain
 - e. Polusi desain arsitektur
 - f. Kejahatan terhadap wisatawan
 - g. Kejahatan oleh wisatawan
5. Dampak terhadap pola pembagian kerja beralihnya mata pencaharian akan memiliki dampak dan tantangan dalam transformasi mata pencaharian.
 6. Dampak terhadap statifikasi dan mobilitas sosial dengan adanya pariwisata di suatu kawasan wisata akan mempunyai tiga konsekuensi, yaitu diferensiasi struktur sosial, modernisasi keluarga, dan memperluas wawasan cara pandang masyarakat
 7. Dampak terhadap distribusi pengaruh dan kekuasaan pengembangan pariwisata diperkirakan akan berdampak dalam pengambilan keputusan yang tidak memikirkan aspek lainnya.
 8. Dampak terhadap meningkatnya penyimpangan sosial. Munculnya sikap mental yang berorientasi untuk menjadi konsumtif yang akan

menimbulkan patologi sosial seperti prostitusi, ketergantungan alkohol, dan perilaku penyimpangan lainnya.

9. Dampak terhadap bidang kesenian dan adat istiadat Pengembangan pariwisata akan berdampak pada hilangnya kebudayaan lokal. Tidak hanya kesenian tetapi juga mendorong munculnya kelompok masyarakat dalam mengembangkan kebudayaan tradisional”.

2.1.5.2 Dampak pariwisata terhadap aspek ekonomi

Dampak pariwisata bagi perekonomian, diantaranya adalah sebagai berikut Utama 2017.

1. ” Pendapatan dari penukaran valuta asing
2. Menyehatkan neraca perdagangan luar negeri
3. Pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata
4. Pendapatan pemerintah
5. Penyerapan tenaga kerja
6. Multiplier effects
7. Pemanfaatan fasilitas pariwisata oleh masyarakat lokal
8. Ketergantungan terlalu besar pada pariwisata
9. Meningkatkan angka inflasi dan tingginya harga tanah
10. Kecenderungan untuk mengimpor barang bahan-bahan.
11. Sifat pariwisata yang musiman
12. Timbulnya biaya tambahan lainnya.”

Menurut Suwena dan Widyatmatma (2017), pariwisata memiliki dampak negatif dan positif terhadap perekonomian. Adapun dampak negatifnya yaitu :

1. “Kebocoran

Kebocoran dalam pengembangan pariwisata di daerah wisata biasanya terjadi kebocoran import yaitu ketika terdapat permintaan peralatan yang berstandar internasional namun belum tersedia di Negara tersebut sehingga perlu mendatangkan peralatan dari Negara lain.

2. Wisata Kantong

Wisata kantong merupakan wisata yang dilakukan hanya sebagai tempat persinggahan, seperti contohnya : kapal persiar singgah disuatu destinasi wisata tanpa menginap sehingga manfaat untuk wisata tersebut rendah.

3. Biaya Infrastruktur

Biaya Infrastruktur pembangunan sektor pariwisata yang berstandar internasional dapat menjadi beban biaya bagi pemerintah, sehingga dapat menimbulkan biaya pajak untuk pembangunan meningkat.

4. Inflasi Permintaan

Inflasi Permintaan terhadap barang dan jasa dari wisatawan yang meningkat dapat harga secara beruntun meningkat “inflasi” yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat lokal. Karena pendapatan yang diusahakan tidak sesuai.

5. Ketergantungan ekonomi

Ketergantungan ekonomi sebuah negara apabila menggantungkan pada satu sektor tertentu akan menjadikan negara tersebut tergantung dari sektor itu saja yang dapat mengakibatkan ketahanan ekonomi memiliki resiko yang sangat tinggi.

6. Karakteristik Musiman

Karakteristik Musiman Dalam Industri pariwisata terdapat dua musim yaitu musim ramai dan musim sepi. Musim ramai terjadi karena kedatangan wisatawan pada puncak maksimalnya, sehingga dapat memberi dampak peningkatan pendapatan. Sedangkan musim sepi yaitu ketika kondisi kedatangan wisatawan menurun sehingga tidak sesuai dengan harapan pembisnis dalam bidang pariwisata sehingga dapat mengakibatkan permasalahan penurunan pendapatan.:

Dampak Positif Pariwisata Terhadap Perekonomian

1. “Pendapatan valuta asing Sektor pariwisata memiliki pengeluaran yang dapat menyebabkan perekonomian masyarakat lokal menjadi stimulus berinvestasi. Sehingga sektor keuangan bertumbuh seiring bertumbuhnya sektor ekonomi lainnya.

2. Kontribusi Untuk Pendapatan Pemerintah Pariwisata yang berkembang memiliki kontribusi untuk pendapatan pemerintah. Seperti kontribusi langsung melalui pungutan pajak dari para pekerja dibidang pariwisata.
3. Penciptaan Lapangan Pekerjaan Perkembangan pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau peluang usaha bagi masyarakat dalam bidang industri pariwisata seperti: akomodasi, restoran dan lain-lain.
4. Pembangunan Infrastruktur Perkembangannya sektor pariwisata dapat mendorong untuk pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Perkembangan ekonomi lokal perkembangan pariwisata sering dijadikan pengukur nilai ekonomi. Namun tidak semua pendapatan dapat diukur seperti misalnya: sopir taksi tidak resmi, pramuwisata tidak resmi, dan lain-lain, yang tidak di ketahui jelas pendapatannya.”

Sedangkan dampak pariwisata menurut Spillane(2014), dapat dijabarkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. “Dampak yang di timbulkan secara langsung, meliputi:
 - a. Terhadap neraca pembayaran, karena pengembangan pariwisata merupakan salah sektor yang mendatangkan devisa negara.
 - b. Kegiatan Industri pariwisata mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong munculnya berbagai lapangan usaha yang menunjang kegiatan pariwisata.
 - c. Meningkatkan perkembangan daerah, karena pada umumnya daerah wisata terletak di pantai, gunung, dan daerah-daerah terpencil yang mempunyai keindahan alam yang dapat dijadikan sebagai objek wisata. Sehingga kegiatan ekonomi dapat berkembang dan meluas ke daerahdaerah tersebut.
2. Dampak secara tidak langsung yang di timbulkan oleh aktivitas pariwisata, yaitu:

- a. Dampak pengadaan berupa sejumlah uang yang diterima masyarakat
- b. Akan menimbulkan beberapa transaksi yang jumlahnya tergantung pada kondisi ekonomi.
- c. Memajukan pasaran produk-produk tertentu karena pariwisata merupakan daya konsumtif yang dinamis yang dapat mendorong konsumsi produk-produk tersebut. Penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak langsung maupun retribusi parkir, berupa karcis masuk dan parkir kendaraan”.

2.1.6 Dampak Pariwisata Sosial Ekonomi Pariwisata

1. Dampak Positif

Pariwisata memiliki efek signifikan terhadap masyarakat dan ekonomi, baik secara positif maupun negatif. Dampak positif dari pengembangan pariwisata meliputi beberapa aspek penting, menurut Muljadi (2010) yaitu pariwisata menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi penduduk setempat di area wisata. Menghasilkan devisa bagi negara terkait, yang dapat meningkatkan perekonomian nasional. Sebagai perangsang bagi pengembangan aktifitas-aktifitas ekonomi lainnya. Infrastruktur serbaguna juga bias diperoleh melalui pariwisata, mendukung pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif adalah pengaruh yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang berakibat tidak baik bagi seseorang maupun lingkungan. Adapun dampak negatif pengembangan wisata menurut Yulianti(2020) antara lain : Investasi yang tinggi dalam pelatihan karyawan di beberapa wilayah menjadi tantangan, mengingat persyaratan yang tinggi dalam industri ini. Risiko kebocoran devisa meningkat jika bahan-bahan yang digunakan dalam pengembangan dan operasional pariwisata harus impor, atau jika fasilitas dikuasai atau dikelola oleh pihak asing. Pengembangan

pariwisata dapat mengakibatkan harga-harga yang tinggi di daerah-daerah setempat dan biaya pembangunan prasarana bias menjadi sangat tinggi. Adanya kunjungan-kunjungan ke monument-monumen budaya dan tempat-tempat bersejarah dapat merusak dan hal ini bisa menyebabkan penduduk tidak dapat menikmatinya.

Pembangunan juga berdampak pada perubahan pola kehidupan tradisional masyarakat dengan prinsip-prinsip familisme, menjadi masyarakat yang memiliki pola kehidupan modern dan individualis di mana nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat menjadi semakin memudar. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam maupun faktor dari luar masyarakat itu sendiri. Perubahan yang terjadi menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi bagi masyarakat. Implikasi dari perubahan tersebut berpengaruh ke dalam dimensi nilai-nilai kehidupan sosial dan budaya yang telah berakar dalam tradisi masyarakat secara turun temurun, seperti nilai-nilai kerja keluarga yang terkait dengan pola kerja kebersamaan yang berubah menjadi individualis dan dapat merenggangkan suatu hubungan sosial.

Penjelasan Kondisi sosial ekonomi masyarakat artinya suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan merupakan seseorang dalam posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi disertai pula dengan seperangkat hak dimainkan oleh masyarakat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat ditandai adanya saling mengenal anatar satu dengan yang lain, penguyuban sifat, kegotong-royongan dan kekeluargaan Wulandari 2019. Kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah suatu usaha bersama didalam suatu masyarakat untuk mengurangi kesulitan hidup, menggunakan lima indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi masyarakat yaitu pendidikan, usia jenis, kelamin, pekerjaan, tingkat pendapatan (Shantika dan Mahagangga 2018).

2.1.6.1 Faktor-Faktor Sosial

“Terdapat beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya sosial ekonomi dimasyarakat, yaitu tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat

pendapatan, kondisi lingkungan tempat tinggal, pemilikan kekayaan, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya.

1. Interaksi sosial

Interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal dapat memicu berbagai tanggapan baik dan buruk tergantung pada manfaat yang di peroleh dari kemajuan pariwisata. Kelompok masyarakat yang merasakan manfaat cenderung memberikan respon positif, dan mendukung perkembangan pariwisata di wilayah mereka. Di sisi lain, mereka yang kurang merasakan manfaat cenderung menunjukkan persepsi negatif, bahkan mungkin menentang atau bersikap apatis terhadap pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan penelitian mengenai respon masyarakat terhadap pengembangan pariwisata, sejalan dengan teori Abbasi Docheh dan Mohamed 2013. Respon positif atau negatif dari masyarakat lokal terhadap perkembangan pariwisata menyoroti kebutuhan akan pemahaman dan penilaian yang baik terhadap pembangunan pariwisata agar dapat menjaga keberlanjutan dan keberhasilan industry pariwisata dalam jangka panjang. Selain itu, melibatkan masyarakat dianggap sebagai aspek fundamental dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

2. Keadaan Lingkungan

Pariwisata merupakan fenomena sosial yang mempunyai pengertian luas tergantung dari tujuan dan pendekatan masing-masing pariwisata yang mengakibatkan banyak sektor kegiatan, mendorong semua pihak khususnya pemerintah untuk menciptakan suatu kondisi yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan suatu kemampuan. Hal tersebut menjadi penting karena lingkungan pariwisata yang berbasis alam, budaya, dan warisan, secara alami mempunyai keterbatasan dalam mempertahankan kondisinya terhadap fenomena kehidupan yang terus berubah dan berkembang, terdapat dalam buku Manajemen Destinasi Pariwisata.

2.1.6.2 Faktor-Faktor Ekonomi

1. Tingkat Pendapatan

Pendapatan merujuk pada total hasil dari pekerjaan yang diterima oleh kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya. Menurut Sumardi dalam Yuriko mengemukakan bahwa pendapatan yang diterima oleh penduduk akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ditempuh. Dengan pendidikan yang tinggi mereka akan dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih besar. Sedangkan bagi penduduk yang berpendidikan rendah dengan pendapatan yang kecil (Yulianti 2020).

2. Perubahan Mata Pencaharian

Mata pencaharian dapat didefinisikan sebagai pekerjaan pokok yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan penghasilan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perubahan mata pencaharian yang terjadi adalah suatu pola adaptasi dan pola perubahan pekerjaan. Pola adaptasi terjadi ketika masyarakat merasa penghasilan dari pekerjaan yang ia miliki mulai menurun, pada akhirnya mereka memiliki atau menciptakan pekerjaan sampingan lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain terjadi pola perubahan pekerjaan, yaitu di mana masyarakat meninggalkan pekerjaan lamanya demi pekerjaan baru yang dirasa dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi sosial tersebut terjadi akibat adanya penyempitan lahan yang disebabkan oleh alih fungsi tanah lahan, sehingga sektor pertanian pun tidak dapat menciptakan hasil yang maksimal. Perubahan mata pencaharian berdampak pada terjadinya perubahan kehidupan sosial masyarakat desa (Shahab, 2013). Perubahan mata pencaharian di wilayah pedesaan terjadi akibat proses pembangunan yang merupakan gerakan perubahan terencana dan terkondisikan, mampu mengubah struktur lahan pertanian daerah tersebut menjadi kawasan perekonomian.

3. Jenis Pekerjaan

Tenagan kerja merupakan faktor produksi yang dibutuhkan ketika melakukan sebuah proses produksi. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang masih bekerja, mencari pekerjaan serta mampu bekerja dan memenuhi persyaratan atas peraturan buruh pada suatu Negara Menurut Julius (2015). Pekerjaan akan menentukan status sosial ekonomi karena dari bekerja segala kebutuhan akan

dapat terpenuhi. Pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi namun usaha manusia untuk mendapatkan kepuasan dan mendapatkan imbalan atau upah, berupa barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi kemampuan ekonominya, untuk itu bekerja merupakan suatu keharusan bagi setiap individu sebab dalam bekerja mengandung dua jenis, kepuasan jasmani dan terpenuhinya kebutuhan hidup (Prasetyo and Suryoko).

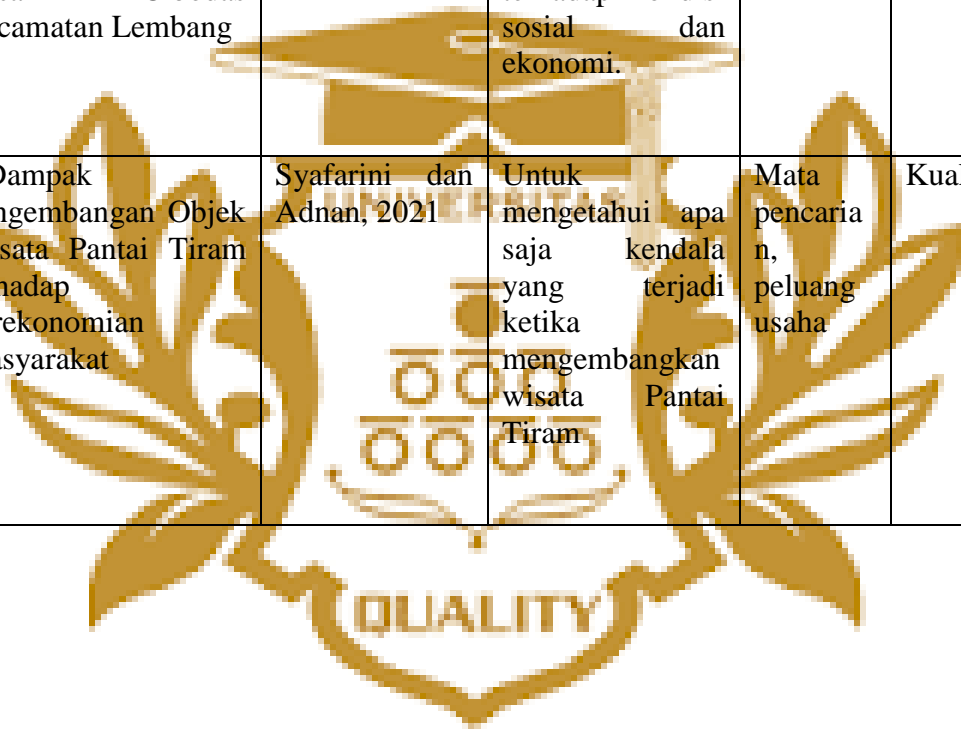
2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat menyempurnakan teori yang digunakan dalam tinjauan penelitian yang digunakan oleh penulis.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

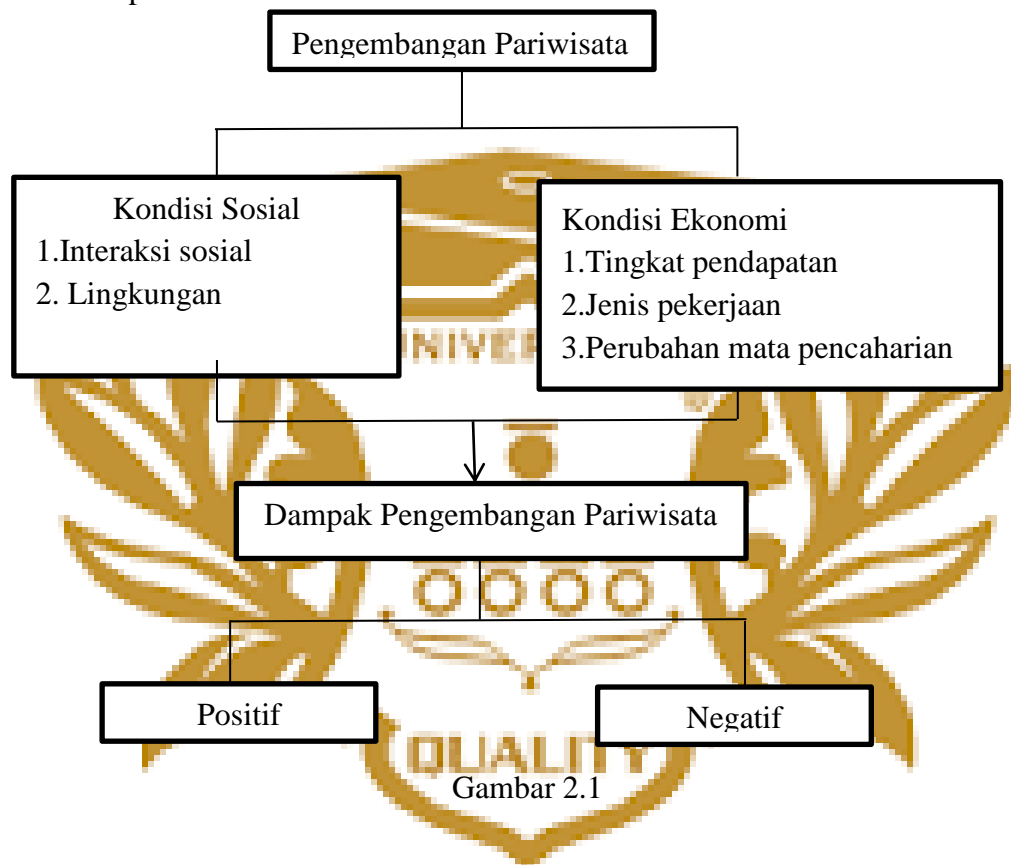
Judul Penelitian	Nama Penulis	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Penelitian
1. Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Dan Kearifan Lokal Di Desa Junrejo	Mochammad Arfani, Victor Marulitua Lumbantobing, Priyanto. 2022	Untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat dan kearifan local	Indicator (Tingkat pendapatan).	Kualitatif deskriptif
2. Analisa Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Di Kampung Wisata Pasir Putih	Wahyu Firmansyah, Nurwinda Apriyani, Juhainah. 2023	Untuk Analisa Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Di Kampung Wisata Pasir Putih	Lapangan Pekerjaan	Kualitatif
3. Dampak Pengembangan Pariwisata Marina Togo Mowodu Terhadap Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat.	Ranti Afriani, La Ode Monto Bauto, Megawati A. Tawulo. 2021	Untuk mengetahui factor-faktor yang mendorong dan menghambat pengembangan pariwisata, Untuk	Mata pencarian, peluang usaha, Peningkatan pendapat	Deskriptif Kualitatif

		mengetahui dampak pengembangan terhadap sosial budaya dan ekonomi.	anmasya rakat.	
4.Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Sosial dan Ekonomi Desa Cibodas Kecamatan Lembang	Facrhriani Julianti dan Lely Syidatul 2018	Mengidentifikasi dampak pengembangan pariwisata terhadap kondisi sosial dan ekonomi.	Penurunan jumlah keluarga miskin	Kualitatif
5.Dampak Pengembangan Objek Wisata Pantai Tiram terhadap Perekonomian Masyarakat	Syafarini dan Adnan, 2021	Untuk mengetahui apa saja kendala yang terjadi ketika mengembangkan wisata Pantai Tiram	Mata pencarian, peluang usaha	Kualitatif



2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikir yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka, yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis karya tulis ilmiah. Adapun kerangka berfikir seperti :



Kerangka berpikir dampak pengembangan pariwisata.

Sumber : Penelitian Terdahulu.

Definisi Konsep

1. Kondisi Sosial dan Ekonomi : Sosial yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, sedangkan ekonomi yaitu ilmu yang

mempelajari perilaku manusia, terbentuknya kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi.

Sosial Ekonomi berarti segala sesuatu hal yang berkaitan dengan tindakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Keadaan dan kondisi sosial ekonomi setiap orang berbeda-beda. Ada yang memiliki kondisi ekonomi rendah, sedang dan tinggi.

2. Pengembangan Pariwisata : Adalah suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, termasuk ekonomi, budaya, lingkungan, dan sosial. Berbagai ahli di bidang pariwisata telah menyumbangkan pemikiran dan pandangan mereka tentang cara terbaik untuk mengembangkan sektor pariwisata.
3. Dampak : Perubahan sosial ekonomi yang terjadi terhadap masyarakat sebelum ada pengembangan dan setelah ada pengembangan.

